

## **REFORMASI MATI SURI ?**

**Oleh: Zulkarnain Lubis**  
**(Visiting Professor Universiti Malaysia Perlis)**

Saya tak tahu pasti apakah ada dokumen resmi yang menandai, bahwa sekarang ini kita berada pada era bernama Orde Reformasi setelah Orde Baru diakhiri. Hanya saja yang saya ketahui bahwa kita pernah punya nama kabinet yang mengandung kata reformasi, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan saat pemerintahan transisi dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yaitu pemerintahan pertama sejak digulirkannya reformasi. Sekarang telah 16 tahun era reformasi dijalani, persisnya sejak tanggal 21 Mei 1998, yang ditandai dengan Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya sebagai presiden kepada B.J. Habibie, bergulirlah era reformasi. Saya tak memahami, apakah sekarang ini masih bisa disebut era reformasi, memang ada momen dan pertanda saat mulai tapi tak ada informasi apakah era reformasi telah diakhiri. Tak ada informasi, tak ada yang mengatakan telah diakhiri, tak ada yang mengakui, dan tak ada pula yang menyebutkan bahwa reformasi masih berlanjut hingga kini. Kalau Orde Lama identik dengan saat Presiden Soekarno menjadi pemimpin di negeri ini, Orde Baru ditandai dengan masa Presiden Soeharto berkuasa hingga beliau mengundurkan diri, maka Orde Reformasi tak jelas apa yang menandai. Apakah reformasi telah berakhir dengan digantinya B.J. Habibie, apakah masih berlanjut sampai Gus Dur dan Megawati, atau sampai dengan SBY nanti berganti, ataukah terus diakui sampai presiden yang menggantikan nanti.

Terlepas dari ada tidaknya pernyataan era reformasi secara resmi, terlepas dari ada atau tidak adanya pengakuan dari pemimpin negeri, namun mestinya ada satu hal yang mesti

dicermati, bahwa era reformasi dianggap sebagai awal lahirnya kembali demokrasi di bumi pertiwi, reformasi adalah momen tumbuhnya demokratisasi, reformasi saat itu diyakini sebagai awal menjadikan hukum sebagai supermasi, reformasi dipercaya hadir untuk menghilangkan korupsi dan kolusi, reformasi merupakan harapan adanya perbaikan dalam birokrasi, dan reformasi merupakan tonggak terwujudnya keadilan untuk sektor ekonomi, serta reformasi akan menghilangkan kepincangan antar sektor dan antar daerah yang relatif tinggi. Namun apa yang terjadi kini, banyak di antara agenda reformasi yang hanya sekedar mimpi, banyak yang seakan berhenti, walaupun ada perubahan, perubahannya seakan tak berarti, kemiskinan masih menyelimuti, korupsi masih tetap mendominasi, kepincangan ekonomi masih tinggi, reformasi birokrasi kesannya hanya basa-basi, hukum masih sering jadi barang dagangan jual-beli, demokrasi kesannya hanya imitasi. Jadi secara substansi, agenda reformasi seakan mengalami dormansi atau mungkin sudah tereliminasi, atau mungkin telah mati suri.

Mungkin secara substansi, agenda reformasi akan susah terealisasi, karena banyak kendala yang membatasi, namun yang lebih ironi, jadi assesori juga sudah tak laku lagi, semakin tak terdengar lagi pejabat menyebutkan kata reformasi, sudah semakin jarang dijumpai kata reformasi baik dalam tulisan resmi maupun dalam puisi. Namun yang paling parah lagi, ketika pemilu legislatif berlangsung baru-baru ini, dalam kampanye yang digelar di sana sini, hampir tak ada partai politik dan caleg yang kampanyenya menyinggung kata reformasi, tak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti, apalagi yang memiliki visi tentang reformasi dan menjadikannya sebagai misi yang perlu direalisasi. Mungkin ada peserta pemilu yang menganggap reformasi adalah barang basi, atau banyak diantara para caleg dan politisi saat ini yang tak memiliki ikatan emosi dengan bergulirnya reformasi, dan ada pula yang tak mengerti

apa makna kata reformasi, atau memang terlupa bahwa reformasi pernah menjadi kata sakti di negeri ini.

Inilah yang membuat saya jadi berpikir dalam hati, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat orang lupa akan peristiwa lahirnya reformasi dan lupa akan agenda reformasi, karena kalau agenda ini terealisasi, maka mereka akan merugi, tak bisa lagi mengakali, tak bisa lagi memainkan birokrasi, tak bisa lagi korupsi, tak bisa lagi memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri sendiri, dan hukum tak bisa lagi dibeli, karena ada yang mengawasi dan hak warga dihargai. Saya juga menyimpulkan sendiri, mungkin banyak yang merasa reformasi adalah isu basi yang sudah tak lagi “seksi”, harganya sudah mati, dan tak layak menjadi komoditi untuk ditawarkan kepada “pembeli”. Memang posisi penentu di negeri ini sudah banyak diisi oleh mereka yang menjadi politisi sesudah bergulirnya reformasi, yang tak ikut berjuang dan berkorban sehingga tak merasakan semangat dan jiwa reformasi. Banyak juga di antara para politisi dan penentu negeri yang saat bergulirnya reformasi, justru sembunyi agar tak tergilas roda reformasi, namun sekarang malah ikut menikmati buah reformasi yang dulu dihindari. Ada lagi mereka yang memang dulu turut berjuang dalam menggerakkan reformasi, tetapi sesudah menjadi politisi dan menduduki birokrasi, sekarang lupa akan misi yang dulu diusung saat menggulirkan reformasi, mereka jadi “amnesia”, lupa diri dan lupa harga diri dengan terjadinya koalisi antara yang direformasi dengan yang mereformasi.

Bagi banyak pihak, reformasi mungkin tak memberi arti, tapi tentu tidak demikian bagi keluarga korban yang telah pergi seiring dengan perjuangan reformasi, ada korban semanggi, ada mahasiswa Universitas Trisakti, dan berbagai nyawa lagi yang tak teridentifikasi ketika dahulu jadi korban saat unjuk rasa yang digerakkan oleh mahasiswa dari berbagai organisasi

mengusung adanya reformasi. Selain mahasiswa yang jadi korban yang digelar pahlawan reformasi, menjelang mulainya era reformasi, kita juga harus ingat berapa banyak gedung dan bangunan yang dihancurkan dan dibakari, berapa banyak pusat perbelanjaan dan pertokoan yang merugi karena barangnya dijarah dan dicuri, dan berapa banyak penganiayaan yang terjadi akibat aksi anarki dan perlakuan sadis oleh manusia yang lepas kendali. Itu semuanya tentu menjadi ongkos terhadap lahirnya reformasi yang nilainya cukup tinggi baik nilai korbanan sosial, emosi, maupun ekonomi.

Mestinya para elit yang menduduki jabatan politik sertayang mengisi jajaran birokrasi, harus berterima kasih kepada mereka yang telah jadi mortir dalam memperjuangkan reformasi, tanpa pengorbanan mereka semua, posisi yang ditempati saat ini pasti hanya sebuah ilusi, mimpi, dan halusinasi. Walau dikatakan buah dari reformasi tak terlalu memberi arti bagi sebahagian besar rakyat di negeri ini, tapi bagi sekelompok orang tertentu, reformasi adalah hoki, sumber rezeki, dan peluang untuk mengekspresikan diri. Sesudah reformasi, sesuatu yang tadinya mustahil, tak mungkin, dan tak terbayangkan, kini terbukti bisa terjadi. Kepala daerah dan lembaga legislatif menjadi lebih bervariasi yang dilatarbelakangi oleh berbagai profesi, serta jabatan-jabatan bergengsi bisa ditempati oleh para praktisi, akademisi, aktivis organisasi, dan para penggiat demokrasi, di samping para politisi. Berbagai undang-undang lahir mengiringi reformasi membuat perubahan yang cukup berarti, sistem pemilu direformasi sehingga partai politik bebas berdiri dan semua orang memungkinkan untuk mencalonkan diri, kekuasaan presiden dibatasi, media massa tak lagi dikebiri, aktivis bebas berdemonstrasi, orang jadi bebas bersuara dan mengkritisi, daerah menjadi lebih mandiri melalui pengaturan otonomi yang menjamin adanya independensi, perolehan sumber daya alam dibuat berbagi, lembaga

pemberantasan korupsi diinisiasi, berbagai lembaga pengawasan berdiri yang bertujuan agar keseimbangan dan harmoni bisa terealisasi, sehingga harapannya hilanglah tirani, hilanglah dominasi, hilanglah tangan besi, dan hilanglah kepemimpinan sesuka hati, serta terhindarlah korupsi dan kolusi dan akan muncullah keadaan yang gemah ripah loh jinawi.

Namun yang namanya orang Indonesia yang memiliki daya kreasi tinggi, sekecil apapun celah yang tersaji, bisa dimasuki para petualang dan pencari sensasi yang hanya bermodalkan materi, janji-janji, populariti, dan ambisi. Kedudukan dan jabatan yang harusnya diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tinggi yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integriti, bisa dikuasai oleh mereka yang kehilangan hati nurani, yang tak cerdas mengukur diri, tak punya prestasi, dan rakus menumpuk materi, sehingga keberhasilan pembangunan hanya sekedar di dalam mimpi. Begitu juga dengan nasib otonomi, daerah-daerah dikuasai oleh segelintir orang dengan model oligopoli yang kadang-kadang mereka melakukan sindikasi menjadi kartel yang perlakunya seperti model monopoli, sehingga semakin menyuburkan korupsi dan kolusi. Jadi wajarlah jika dikatakan bahwa otonomi era dalam reformasi, yang terjadi adalah desentralisasi politik monopoli dan politik oligopoli, desentralisasi korupsi, dan desentralisasi kolusi. Akibatnya, rezeki reformasi berhenti pada elit dan politisi, sehingga rakyat hanya bisa gigit jari dan tak ikut menikmati buah dari otonomi.

Banyaknya partai politik yang tumbuh di era reformasi, ibarat tumbuhnya bunga di musim semi, diyakini sejatinya bukanlah untuk membuat rakyat dan warga bisa menikmati kekayaan negeri, tetapi hanya berorientasi untuk ikut kecipratan rezeki dan kebagian porsi dalam bagi-bagi harta kekayaan ibu pertiwi dan hasrat yang tinggi untuk ikut menguasai serta menikmati pelayanan dan fasilitas kualitas tingkat tinggi.

Sistem pemilihan langsung juga tidak menghasilkan pemimpin sebagaimana yang dicari, malahan yang terjadi adalah pertarungan antar calon yaitu adu kuat amunisi, adu jago strategi, adu kemampuan bertransaksi, adu kuat memanfaatkan advertensi, saling adu caci mencaci yang berdampak pada saling membenci, serta saling adu pengerahan massa untuk menunjukkan siapa yang paling punya taji. Akhirnya yang berjaya memenangi adalah orang yang punya nyali, punya ambisi, punya materi untuk amunisi yang dibagi-bagi sebagai biaya transaksi, pandai berjanji-janji, serta berani, yaitu berani ingkar janji, berani berkelahi, berani berurusan dengan polisi, berani digari, berani masuk bui, berani menyakiti, dan berani disakiti. Sementara itu, mereka yang punya potensi, punya idealisme tinggi, punya kompetensi, punya prestasi, dan kepribadian terpuji, karena selain tak berani bertarung, juga tak punya banyak amunisi, dan tak mampu untuk ingkar janji, juga tak tega untuk saling mencaci dan menyakiti. Beberapa kepala daerah dan anggota legislatif yang memiliki prestasi dianggap adalah anomaly dari bentuk umum yang terjadi.

Untuk kekuasaan presiden yang dibatasi juga tak menjadi solusi, pemerintah seakan tak berdaya menghadapi lembaga legislatif yang justru kekuasaannya menjadi seakan tak bertepi, hampir semua keputusan harus melalui lembaga perwakilan rakyat ini, akhirnya kondisi ini menjadi kunci untuk memperjuangkan agenda pribadi. Para politisi yang duduk di ruang dewan, sangat lancar memainkan akrobat dan sandiwara dengan lihai dan piawai, sehingga mereka mampu menutupi motivasi yang ada dihati, sehingga mampu membuat samar mana pernyataan yang palsu mana yang asli, mana yang bantuan mana yang jebakan, mana yang aman mana pula yang menyesatkan, serta mana yang membangun manapula yang menghancurkan. Pemerintah dan DPRpun akhirnya sering terlibat dalam adu strategi yang

berujung pada transaksi, jika voting terjadi, tentulah nilai transaksi menjadi semakin tinggi. Jadi tak heran jika ada institusi yang memberi rating tinggi terhadap lembaga ini untuk intensitas praktik korupsi.

Ringkasnya semua rencana yang terkandung dalam agenda reformasi, seakan berjalan sesuai yang dipedomani, tetapi efek negatifnya yang terjadi. Saya tidak tahu apakah ini juga sebabnya orang seakan enggan membicarakan reformasi, sehingga reformasi seperti mati suri. Pada saat begini, saya teringat dengan mahasiswa yang saat itu tampil heroik dan semangat tinggi sebagai penggerak reformasi. Ingin saya bertanya, kemanakah suara mahasiswa kini, apakah mereka ikut arus kehilangan jati diri, ikut lupa diri, ikut "amnesia" terhadap ikrar yang dulu tertanam di hati, sehingga seakan turut membiarkan reformasi mati suri. Saya juga heran kemana perginya para orang tua yang dulu mendukung gerakan reformasi, sudahkah mereka puas dengan apa yang terjadi kini, atautkah mereka juga ikut melupakan reformasi. Satu lagi yang saya prediksi, para capres yang akan bertarung nanti, pasti tidak akan ada yang bicara tentang reformasi, agenda reformasi, dan evaluasi terhadap keberhasilan era reformasi. Jadi kalau begitu salahkah saya jika saya bertanya, apakah reformasi sudah mati suri atau betul-betul sudah mati ??? Selamat memperingati reformasi, bagi yang masih menganggap bahwa reformasi tak pernah mati !!!!!